

# MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN

Fitri Ismiyanti<sup>1)</sup>, Chintia Prastichia<sup>2)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

## ABSTRACT

*Purpose of this research to examines factors that may affect fraud on financial statements that could encourage the emergence of corruption by management. This research uses banks as industry sample because banking industry is a highly regulated and should report their financial statement to central bank. Meanwhile, banks still frequently appears the fraudulent financial statements. Good corporate governance mechanism indicated that bank have capability to detect fraud in financial statement. This research focuses on testing factors that may affect the financial statements fraud and lead to corruption of management. The data uses in this research is financial statement data. Corporate governance mechanism tests in this study is snumber of commissioners, percentage of independent directors, numbers of commissioners meeting, percentage of largest share ownership, managerial ownership, long tenure of commissioners, and type of auditor. This research found that the number of commissioners and managerial ownership affects management's fraud, while the number of independent directors, the number of commissioners meeting, a long tenure managing director, large share ownership and the type of auditor has no effect on fraud.*

*Keywords: Fraud, Corruption Management, Corporate Governance Mechanism.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan laporan keuangan (*fraud*) merupakan perilaku atau tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi dan mencurangi laporan keuangan untuk kepentingan pribadi, ataupun golongan tertentu. *Fraud* merupakan perilaku penipuan yang disengaja yang bertujuan untuk menggelapkan atau mencuri. Penggelapan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perilaku yang dilakukan dengan mengubah aset atau kekayaan perusahaan secara tidak wajar.

Industri perbankan merupakan industri yang teregulasi sangat ketat karena segala transaksi yang dilakukan harus dilaporkan ke bank Indonesia. Akan

tetapi berdasarkan data statistik Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) hingga tahun 2009, perbankan merupakan industri penyumbang Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terbesar, yaitu sebesar 78,8% dari 24.392 kasus atau setara dengan 19.242 kasus.

Penipuan yang dilakukan sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 tercatat sejumlah 15.097 kasus dengan total kerugian negara sebesar Rp 86,76 Milyar. Kecurangan internal yang ditemukan tersebut sebagian besar menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal perbankan. *Fraud* dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal tersebut berhubungan dengan organisasi di mana pelaku melakukan

*fraud*. *Corporate governance* yang baik diindikasikan mampu untuk menghalangi faktor eksternal pemicu *fraud*. Beberapa penelitian dilakukan untuk membuktikan pengaruh *corporate governance* terhadap terjadinya *fraud*. Jensen (1993) beragumen bahwa dewan *board* yang besar menjadi kurang efektif dan direktur utama akan lebih mudah untuk mengendalikan, sehingga memudahkan terjadinya kecurangan internal. Berdasarkan penelitian Beasley (1996) dan Uzun *et al.* (2004), perusahaan dengan prosentase komisaris independen yang tinggi memiliki tingkat *fraud* yang lebih rendah. Chen *et al.* (2005) menemukan bahwa rapat *board* berpengaruh signifikan positif terhadap *fraud*. Lama masa jabatan dari direktur utama dan kepemilikan manajerial mungkin memiliki pengaruh terhadap probabilitas terjadinya kecurangan perusahaan (Beasley, 1996). Zhang (2005) menemukan bahwa pemegang saham terbesar memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap skandal perusahaan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Perols (2008) mengindikasikan bahwa keberadaan auditor *Big 4* adalah salah satu variabel signifikan dalam pendeteksian terjadinya *fraud* dalam organisasi.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap *fraud*. Semakin banyak dewan komisaris dalam perusahaan maka fungsi pengawasan akan kurang terpusat sehingga dapat memberikan celah terjadinya *fraud*. Semakin besar proporsi komisaris independen maka pengawasan yang independen akan semakin besar dan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya *fraud*. Jumlah rapat dewan komisaris

mungkin dapat menjadi indikator aktivitas pengawasan dewan komisaris. Semakin sering dewan komisaris rapat, menunjukkan pengawasan dewan komisaris yang semakin tinggi, sehingga probabilitas terjadinya *fraud* diindikasikan semakin meningkat. Lama masa jabatan direktur utama menentukan pengalaman yang dimiliki direktur utama dalam menangani perusahaan. Semakin lama masa jabatan direktur utama, maka akan semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki tentang perusahaan tersebut, sehingga kemungkinan terjadinya *fraud* akan berkurang. Kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen, sehingga dapat menurunkan probabilitas *fraud*. Pemegang saham terbesar dapat mengurangi probabilitas terjadinya *fraud*. Hal ini dikarenakan pemegang saham terbesar dapat membantu dewan komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan. Probabilitas terjadinya *fraud* juga dapat dikurangi dengan adanya auditor yang berkualitas. Auditor dapat membantu perusahaan dalam mendeteksi terjadinya penyelewengan pada laporan keuangan. Semakin baik kualitas auditor, maka hasil auditnya semakin bisa dipercaya dan tingkat independensi yang dimiliki semakin tinggi.

Penelitian sebelumnya (Chen *et al.*, 2005), meneliti semua perusahaan yang tercatat di bursa efek Cina selama lima tahun dan dihubungkan dengan *The Security Law* yang diterbitkan oleh *China Securities and Regulatory Commission* (CSRC). Variabel dependen yang merupakan variabel dummy bernilai 1 jika perusahaan merupakan subjek dari

tindakan hukum oleh CSRC serta menggunakan uji *univariate* dan regresi logistik. Variabel independen (variabel *corporate governance*) yang diuji terdiri dari proporsi komisaris independen, jumlah *board*, jumlah rapat komisaris, lama masa jabatan direktur utama, *CEO duality*, proporsi kepemilikan saham oleh badan usaha, proporsi kepemilikan saham individu, kepemilikan saham asing, prosentase kepemilikan saham terbesar, Herfindhal index yang mengukur konsentrasi dari sepuluh pemegang saham terbesar, tipe auditor, tingkat pertumbuhan perusahaan, kerugian perusahaan, *leverage*, tingkat pengembalian, dan MINDEX. Penelitian ini menggunakan pendekatan variabel *dummy* yang bernilai 1 jika auditor adalah salah satu dari sepuluh auditor terbesar berdasarkan pangsa pasar di Cina untuk variabel kualitas auditor. Hal ini dikarenakan audit independen masih cukup baru di Cina. Chen juga tidak meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap terjadinya *fraud* dikarenakan kepemilikan manajerial masih jarang pada perusahaan sampel penelitian selama masa pengamatan.

Pada penelitian ini, variabel dependen yang merupakan variabel *dummy* bernilai 1 jika terjadi *internal fraud* dalam perusahaan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 karena di Indonesia belum memiliki organisasi yang mempublikasikan perusahaan-perusahaan memiliki kasus *fraud*, serta hanya meneliti perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena peraturan untuk mengungkapkan *internal fraud* ditujukan hanya kepada bank umum di Indonesia.

Periode sampel penelitian ini ialah empat tahun, karena peraturan pengungkapan *internal fraud* bagi bank dikeluarkan mulai tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji regresi logistik. Variabel independen (variabel *corporate governance*) yang diuji ialah jumlah dewan komisaris, komisaris independen, jumlah rapat komisaris, lama masa jabatan direktur utama, kepemilikan manajerial, kepemilikan saham terbesar, dan tipe auditor. Di semua bank sampel penelitian tidak terdapat *CEO duality*, sehingga variabel ini tidak dimasukkan dalam model penelitian. Sebagian besar perusahaan yang diteliti tidak menyajikan pemegang saham secara jelas sehingga variabel kepemilikan saham individu, legal, asing dan Herfindhal index yang mengukur konsentrasi kepemilikan sepuluh pemilik saham terbesar tidak dapat dimasukkan dalam model penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memproksi kualitas auditor dengan variabel *dummy* yang bernilai 1 jika auditor adalah KAP yang berafiliasi dengan auditor

*Big 4*.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah, apakah mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari jumlah dewan komisaris, prosentase komisaris independen, jumlah rapat komisaris, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan manajerial, lama masa jabatan komisaris, dan tipe auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari jumlah dewan komisaris, prosentase komisaris independen, jumlah rapat komisaris, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan manajerial, lama masa jabatan komisaris, dan tipe auditor terhadap kecurangan laporan keuangan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 *Fraud*

Hall (2001, p.135) mendefinisikan *fraud* sebagai kecurangan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Penelitian Chen *et al.*, (2005) mendefinisikan *fraud* sebagai kesalahan dan ketidaksesuaian pengungkapan keuangan, pengambilalihan asset-aset yang merugikan investor minoritas, korupsi pejabat perusahaan dan perusahaan sekuritas, dan manipulasi pasar saham. Ini merujuk pada ketetapan yang diterbitkan oleh CSRC (*China Securities and Regulatory Commission*).

Penelitian ini mendefinisikan *fraud* sesuai definisi *internal fraud* pada SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, yaitu penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan. Pengaruh terhadap kondisi keuangan bank secara signifikan ialah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp 100.000.000

(seratus juta rupiah). Salah satu mekanisme pengungkapan *fraud* melalui sistem *whistleblowing* yang memungkinkan setiap pegawai untuk melaporkan kepada direktur utama jika menemukan adanya pelanggaran pada pegawai lainnya. Setelah itu, kepala audit internal akan menanggapi laporan tersebut. *Fraud* juga dapat ditemukan dari hasil investigasi audit internal dan audit eksternal (kantor akuntan publik dan Bank Indonesia). Ruang lingkup audit internal ialah seluruh aspek dan unsur bank. Hasil temuan audit internal nantinya akan disampaikan pada direksi dan dewan komisaris dengan tembusan komite audit. Audit internal juga melakukan koordinasi dengan auditor eksternal. Bank juga membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Resiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan operasional bank.

*Fraud* dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor dari dalam individu pelaku *fraud*, yaitu faktor keserakahan dan kebutuhan. Faktor eksternal yang dimaksud ialah faktor di luar individu pelaku *fraud*, yang berhubungan dengan organisasi, yaitu kesempatan dan pengungkapan. *Fraud* bisa terjadi karena adanya kesempatan dan tidak terungkapnya *fraud* serta tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku *fraud* yang terungkap (Ditama Binbangkum, 2008).

*The ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)* mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu,

1. Penyimpangan atas aset  
Penyimpangan atas aset meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur atau dihitung.
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan  
Pernyataan palsu atau salah pernyataan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.
3. Korupsi  
*Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi.

## 2.2 Jumlah Dewan Komisaris

Prinsip *good corporate governance* yang diperkenalkan oleh OECD terdiri dari transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Prinsip akuntabilitas menyebutkan bahwa dewan komisaris bertanggung jawab pada pengawasan dan wajib memberikan nasehat pada dewan direksi atas pengelolaan perusahaan. Jumlah dewan komisaris dapat mempengaruhi terciptanya prinsip akuntabilitas pada perusahaan. Hal

tersebut berkaitan dengan efektivitas pengawasan dewan komisaris.

Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan direksi serta memberi nasihat kepada direksi. Menurut *Board Manual* yang diterbitkan oleh PT. Surveyor Indonesia, komisaris dapat melakukan pengawasan dengan berbagai cara, yaitu meminta keterangan tertulis pada direksi tentang permasalahan perusahaan, melakukan kunjungan ke unit kerja, memberikan tanggapan atas laporan berkala direksi, dan menugaskan komite audit untuk melakukan tugas-tugas pengawasan. Jumlah dewan komisaris dapat mempengaruhi efektivitas kegiatan pengawasan tersebut.

Jensen (1993) menemukan bahwa perusahaan dengan jumlah *board* yang lebih besar maka keefektifan pengawasannya akan berkurang. Perusahaan dengan jumlah dewan komisaris yang semakin kecil memiliki kinerja keuangan yang unggul. Beasley (1996) menemukan bahwa jumlah *board* berpengaruh signifikan positif terhadap *fraud* perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan semakin besar jumlah dewan komisaris maka probabilitas terjadinya *fraud* perusahaan semakin besar. Hal itu mungkin dikarenakan semakin besar dewan komisaris maka koordinasinya pun akan semakin susah, sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan akan menjadi kurang efektif.

## 2.3 Komisaris Independen

Salah satu prinsip *good corporate governance* adalah independensi.

Perusahaan harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi tersebut untuk menghindari adanya kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh pemegang saham terbesar. Pada suatu perseroan, diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen, yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI No.8/14/PBI/2006) tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, bank harus memiliki komisaris independen yakni anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris independen berperan dalam penyeimbang pada pengambilan keputusan oleh dewan komisaris agar keputusan yang diambil bersifat independen tidak memihak pada pihak-pihak tertentu. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa pengendalian keputusan yang efektif merupakan fungsi positif dari rasio *outside director* dengan total *board of director*. Pengawasan oleh komisaris independen memiliki tujuan untuk memberikan sinyal kepada masyarakat tentang reputasi aktivitas pengawasan yang efektif dalam perusahaan.

Komisaris independen memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen secara umum, sehingga mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer (Chtourou *et al.*, 2001). Semakin besarnya proporsi komisaris independen dan semakin kompetennya mereka, maka dapat mengurangi kecenderungan terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Hal tersebut juga dapat berlaku pada *fraud*. Semakin besar dan kompetennya komisaris independen, probabilitas terjadinya *fraud* mungkin akan berkurang karena adanya pengawasan yang lebih baik.

#### 2.4 Jumlah Rapat Komisaris

Prinsip akuntabilitas menuntut terciptanya sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen. Rapat yang diselenggarakan dewan komisaris merupakan salah satu pencerminan prinsip akuntabilitas. *Monitoring*, pengendalian, dan evaluasi terhadap manajemen dapat dilakukan melalui rapat dewan komisaris. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai kepentingan pemegang saham.

Menurut SE BI No. 9/12/DPNP dewan komisaris melakukan rapat rutin dengan direksi minimal empat kali dalam setahun dan melakukan rapat komite-komite di bawah dewan komisaris. Dewan komisaris membahas masalah-masalah yang dianggap penting dalam mempengaruhi perusahaan. Seringnya diadakan rapat komisaris dalam setahun

mengindikasikan terjadinya peningkatan kewaspadaan dan pengawasan.

Vafeas (1999) menemukan bahwa frekuensi rapat *board* yang lebih sering, diikuti dengan kinerja yang buruk dan diisukan terjadi peningkatan pada profitabilitas. Hasil ini mungkin dikarenakan adanya kinerja yang buruk. Rapat yang lebih sering dilakukan sebagai langkah pengawasan yang lebih ketat untuk memperbaiki kinerja, sehingga terjadi peningkatan profitabilitas.

Chen *et al.*, (2005) menemukan bahwa jumlah rapat *board* pada perusahaan yang tidak terjadi *fraud* lebih sedikit dibanding perusahaan terjadi *fraud*. Jumlah rapat dewan komisaris merupakan indikasi dari aktifitas dewan komisaris. Semakin seringnya dewan komisaris mengadakan rapat, menunjukkan bahwa aktifitas pengawasan menjadi lebih ketat. Akan tetapi, Juwitasari (2008) tidak menemukan adanya pengaruh dari jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.

## 2.5 Lama Masa Jabatan Direktur Utama

Direktur utama berperan penting dalam keberhasilan perusahaan. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP mengatur bahwa direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Hal ini dimaksudkan agar setiap keputusan yang diambil tidak memihak pada pihak-pihak tertentu sehingga tidak merugikan pemegang saham minoritas.

Prinsip *responsibility* (responsibilitas) menuntut adanya tanggung jawab dari manajemen, pengawasan manajemen serta

pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi dari adanya wewenang dan menyadari adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara bisnis yang sehat. Direktur utama harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diamanatkan. Prinsip ini harus tercermin selama direktur utama memimpin, sehingga kemungkinan terjadinya *fraud* menjadi rendah. Direktur utama bertanggung jawab pada pengelolaan perusahaan secara keseluruhan dan membawahi beberapa direktur yang menjalankan fungsi eksekutif pada perusahaan.

Chen *et al.* (2005) menemukan bahwa lama masa jabatan direktur utama berpengaruh signifikan negatif terhadap terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Hal ini berarti lama masa jabatan direktur utama memiliki keterkaitan negatif dengan kemungkinan terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Pengaruh yang negatif menunjukkan bahwa semakin singkat seorang direktur utama menjabat maka kecenderungan terjadinya *fraud* akan semakin besar. Hal ini mungkin dikarenakan sedikitnya pengetahuan tentang perusahaan yang dimiliki, sehingga menimbulkan celah terjadinya *fraud*.

## 2.6 Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan cukup berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial ialah pemegang

saham dari pihak manajemen yaitu dewan komisaris dan direksi yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Wahidahwati, 2002). Kepemilikan manajerial bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham menginginkan peningkatan nilai perusahaan, sedangkan manajemen memiliki kepentingan sendiri dalam perusahaan, seperti memperkaya diri sendiri dan lain-lain. Kepemilikan manajerial juga bertujuan untuk mengurangi biaya keagenan yang akan timbul. Hal ini dikarenakan manajemen yang memiliki saham pada perusahaan tersebut akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham lainnya, yaitu peningkatan nilai perusahaan.

Kepemilikan manajerial juga dapat mendorong terciptanya prinsip kewajaran pada perusahaan. Prinsip tersebut menyebutkan bahwa semua *stakeholder* harus mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Antara manajemen dan pemegang saham dimungkinkan terjadinya asimetri informasi yang bisa merugikan pemegang saham. Adanya kepentingan pemegang saham terbesar juga mungkin membuat manajemen cenderung berpihak pada pemegang saham terbesar. Hal ini mungkin akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Kepemilikan manajerial mungkin dapat menghindari keputusan atau perlakuan manajemen yang hanya berpihak pada pemegang saham terbesar.

Vafeas (1999) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja

perusahaan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa manajemen yang turut memiliki saham pada perusahaan memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan meningkat, maka nilai perusahaan juga akan meningkat, dan hal ini akan menguntungkan bagi pemegang saham, termasuk pihak manajemen yang memiliki saham.

Antonia (2008) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti adanya kepemilikan manajerial dapat mengurangi motivasi untuk melakukan manipulasi laba. Manajemen mungkin akan cenderung termotivasi untuk meningkatkan kinerja daripada sekedar memanipulasi laba perusahaan.

## 2.7 Kepemilikan Saham Terbesar

Salah satu prinsip dalam *good corporate governance* yaitu akuntabilitas yang memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi serta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan, dewan komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan, pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam pengelolaan perusahaan (IICG, 2011).

Pemegang saham terbesar turut mengawasi pengelolaan perusahaan dengan mengikuti rapat perusahaan dan sebagainya. Pemegang saham terbesar juga dapat menuntut pengelolaan perusahaan yang transparan dan wajar, sehingga

perusahaan dapat dikelola secara baik. Peran serta pemegang saham terbesar untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik berperan dalam terwujudnya prinsip akuntabilitas.

Struktur kepemilikan dapat memicu biaya keagenan. Ketika struktur kepemilikan perusahaan tersebar seperti, biaya keagenan muncul dari konflik kepentingan antara pemegang saham luar perusahaan dan manajemen perusahaan (Jensen & Merckling, 1976). Pada struktur kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi seperti perusahaan-perusahaan, masalah keagenan menjadi masalah antara pemegang saham terbesar dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham terbesar biasanya memiliki kekuatan yang cukup besar pada perusahaan, sehingga pemegang saham terbesar dapat menghalangi atau mendorong terjadinya *fraud* pada perusahaan.

Zhang (2005) menemukan bahwa proporsi saham terbesar berpengaruh signifikan negatif terhadap terjadinya skandal di perusahaan. Hasil ini berarti semakin besar proporsi pemegang saham terbesar, probabilitas terjadinya skandal akan berkurang. Hasil tersebut mungkin dikarenakan pemegang saham terbesar juga ikut mengawasi jalannya perusahaan, sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh pihak manajerial akan berkurang.

## 2.8 Tipe Auditor

Dalam prinsip keterbukaan dalam *good corporate governance*, informasi mengenai perusahaan harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan

masyarakat mengetahui keadaan perusahaan. Salah satu butir prinsip keterbukaan menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) adalah perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan yang teraudit oleh auditor eksternal, kinerja usaha, laporan *corporate governance* ke publik dan instansi yang berwenang secara rutin. Auditor eksternal berperan dalam terwujudnya prinsip tersebut. Auditor eksternal juga membantu agar informasi yang tersaji ke publik merupakan informasi yang objektif.

Audit ialah suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan laporan yang telah diaudit oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan (Meutia, 2004).

Perols (2008) menemukan pengaruh signifikan positif dari auditor *Big 4* terhadap pendektasian terjadinya *fraud*. Hasil ini mengindikasikan jika perusahaan menggunakan jasa audit dari auditor *Big 4* maka probabilitas *fraud* akan berkurang. Auditor *Big 4* dapat mendeteksi secara lebih dini jika terjadi *fraud* dalam perusahaan.

Di dunia terdapat empat besar firma auditor atau *Big 4*, yaitu kelompok empat firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yaitu *Deloitte*

*Touche Tohmatsu, Pricewaterhouse Cooper (PWC), Ernst & Young* dan KPMG. Kelompok ini awalnya dikenal dengan *Big 8*, dan berkurang menjadi *Big 5* melalui serangkaian kegiatan merger. *Big 5* tersebut akhirnya menjadi *Big 4* setelah keruntuhan Arthur Andersen pada 2002, karena keterlibatannya dalam Skandal Enron. Berikut kantor akuntan publik (KAP) Indonesia yang berafiliasi dengan auditor *Big 4*. KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja berafiliasi dengan *Ernst & Young*; KAP Haryanto Sahari & Rekan (pada 2010 berganti dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan) berafiliasi dengan *Pricewaterhouse Cooper (PWC)*; KAP Osman Bing Satrio & Rekan berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*; dan KAP Siddharta & Widjaja berafiliasi dengan KPMG.

## **2.9 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Fraud**

Penelitian yang dilakukan Jensen (1993) menemukan bahwa semakin besar jumlah *board* maka fungsi pengawasan akan menjadi kurang efektif. Yermack (1996) membuktikan bahwa *board* yang kecil lebih efektif dibanding dewan komisaris yang besar. Vafeas (1999) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif dari jumlah *board* terhadap nilai perusahaan. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris maka nilai perusahaan akan turun.

Nasution dan Setiawan (2007) membuktikan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Ini berarti semakin banyak dewan komisaris maka praktek manipulasi laba akan semakin meningkat. Ujjiyantho dan Pramuka (2007)

tidak menemukan pengaruh signifikan dari ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba, tapi memiliki pengaruh yang positif.

Beberapa penelitian di atas mengindikasikan adanya pengaruh positif dari jumlah komisaris terhadap *fraud*. Pengaruh tersebut berarti semakin banyak anggota dewan komisaris perusahaan maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan semakin tinggi. Semakin banyaknya dewan komisaris mengakibatkan fungsi pengawasan tidak dapat terpusat, semakin sulit untuk melakukan koordinasi pengawasan (Nasution dan Setiawan, 2007). Hal tersebut dapat memicu adanya kemudahan manajemen untuk mengendalikan dewan komisaris. Adanya kendali tersebut membuat kemungkinan untuk terjadinya *fraud* akan lebih besar.

## **2.10 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Fraud**

Rosenstein dan Wyatt (1990) menemukan bahwa prosentase *outside director* dapat meningkatkan nilai perusahaan. Beasley (1996) juga menemukan bahwa *outside director* meningkatkan keefektifan pengawasan yang ditunjukkan dengan adanya pengaruh signifikan negatif dari proporsi *outside director* terhadap *fraud*. Uzun *et al.* (2004) menguji pengaruh proporsi *outside director* terhadap probabilitas terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa *outside director* berpengaruh signifikan negatif terhadap probabilitas terjadinya *fraud* dalam perusahaan.

Chen *et al.* (2005) menemukan bahwa prosentase *outside director* memiliki pengaruh signifikan negatif

terhadap terjadinya *fraud*, yang berarti semakin besar proporsi *outside director* maka probabilitas terjadinya *fraud* akan semakin kecil. Nasution dan Setiawan (2007) menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut ialah proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Palestin (2008) yang menemukan proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan negatif dengan manajemen laba.

Hasil penelitian-penelitian tersebut menimbulkan adanya indikasi bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang berlawanan arah dengan terjadinya *fraud* pada perusahaan. Semakin rendah prosentase komisaris independen pada dewan komisaris maka kecenderungan terjadinya *fraud* akan semakin tinggi. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya efektifitas dari fungsi pengawasan komisaris independen. Independensi dari komisaris independen disebabkan oleh tidak adanya kepentingan dengan perusahaan, sehingga tidak ada dorongan untuk melakukan tindakan yang menjurus pada *fraud*.

### **2.11 Pengaruh Jumlah Rapat Komisaris terhadap *Fraud***

Rapat dewan komisaris dilakukan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh dewan direksi dan implementasinya (Waryanto, 2010). Conger *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) menyarankan bahwa rapat dewan komisaris merupakan sumber penting untuk peningkatan keefektifan dewan

komisaris. Vafeas (1999) menemukan bahwa frekuensi rapat *board* yang lebih sering, diikuti dengan kinerja yang buruk dan diisukan terjadi peningkatan pada profitabilitas. Seringnya rapat diadakan merupakan indikasi adanya peningkatan aktifitas pengawasan pada perusahaan dan hal tersebut biasanya dihubungkan sebagai pertanda adanya kinerja buruk perusahaan.

Uji univariat penelitian Chen *et al.* (2005) menemukan bahwa perusahaan yang terlibat *fraud* memiliki jumlah rapat *board* dalam setahun yang lebih sering dibanding perusahaan yang tidak terlibat *fraud*. Pada uji multivariat penelitian tersebut juga menemukan bahwa jumlah rapat *board* dalam setahun memiliki pengaruh signifikan positif terhadap terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin seringnya rapat diadakan dapat memperbesar probabilitas terjadinya *fraud* dalam perusahaan.

Penelitian-penelitian di atas mengindikasikan bahwa jumlah rapat komisaris memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*. Semakin sering rapat komisaris diadakan maka akan semakin besar kecenderungan terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Indikasi adanya aktivitas atau keputusan yang dipertanyakan atau mencurigakan membuat dewan komisaris akan semakin memperketat pengawasan terhadap perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan dan pengontrolan pada pengelolaan perusahaan oleh direksi adalah mengadakan rapat dewan komisaris yang lebih sering.

## 2.12 Pengaruh Lama Masa Jabatan Direktur Utama terhadap *Fraud*

Beasley (1996) menemukan bahwa lama masa jabatan direktur utama tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Parker *et al.* (2002) menemukan bahwa pergantian direktur utama merupakan indikasi lemahnya kemampuan bertahan perusahaan. Berdasarkan teori suksesi-krisis, pergantian direktur utama dapat mengganggu karena dapat menyebabkan moral organisasi menjadi lebih rendah serta meningkatkan ketidakpastian dan konflik.

Chen *et al.* (2005) dalam uji univariatnya menemukan bahwa perusahaan yang terlibat *fraud* masa jabatan direktur utamanya lebih pendek dibanding perusahaan yang tidak terlibat *fraud*. Uji multivariatnya menemukan bahwa lama masa jabatan direktur utama berpengaruh signifikan negatif terhadap terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Hasil tersebut bermakna bahwa semakin lama masa jabatan direktur utama maka probabilitas terjadinya *fraud* akan semakin rendah.

Beberapa hasil tersebut mengindikasikan bahwa lama masa jabatan direktur utama memiliki pengaruh negatif dengan kemungkinan terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Arah yang berlawanan menunjukkan semakin singkat seorang direktur utama menjabat maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan semakin tinggi. Kemungkinan tersebut dapat diakibatkan dari singkatnya masa jabatan, sehingga membuat pengetahuan tentang perusahaan yang diperoleh direktur utama semakin sedikit (Chen *et al.*, 2005). Hal tersebut mungkin akan menimbulkan

banyak celah terjadinya *fraud* pada perusahaan tersebut.

## 2.13 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Fraud*

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa adanya peningkatan kepemilikan manajerial dapat mendorong manajer untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer untuk bertindak secara hati-hati. Hal ini dapat disebabkan oleh rasa memiliki perusahaan dengan adanya kepemilikan saham. Jika terdapat keputusan yang merugikan pemegang saham, maka pihak manajemen juga turut merasakan kerugian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Vafeas (1999) yang menemukan bahwa kepemilikan saham dalam (manajerial dan pegawai) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham dalam, kinerja perusahaan juga semakin meningkat.

Saleh *et al.* (2005), Ujyantho dan Pramuka (2007), serta Antonia (2008) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hal ini sejalan dengan Warfield *et al.* (1995) yang juga menemukan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan berarti semakin besar kepemilikan manajerial, maka praktek manipulasi laba dapat dikurangi. Manajemen yang memiliki saham pada perusahaan akan cenderung bekerja untuk saham yang dimiliki, jika terjadi manipulasi laba tentunya akan berimbas pada pemilik saham manajerial tersebut.

Dari beberapa penelitian tersebut, diindikasikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya *fraud*. Hal ini dapat disebabkan adanya motivasi untuk tidak merugikan diri sendiri sebagai pemegang saham perusahaan. Jika terjadi *fraud*, maka sebagai pemegang saham, manajerial juga akan dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya *fraud* mungkin akan menurunkan nilai perusahaan di mata masyarakat sehingga dalam jangka panjang akan berimbas buruk pada perusahaan. Efek secara langsungnya ialah *fraud* dapat berakibat buruk pada keuangan perusahaan, misalnya berkurangnya ketersediaan aset lancar yang digunakan untuk membayar hutang kreditur.

#### **2.14 Pengaruh Kepemilikan Saham Terbesar terhadap *Fraud***

Zhang (2005) menguji pengaruh proporsi saham terbesar terhadap probabilitas terjadinya skandal. Penelitian tersebut menemukan bahwa proporsi saham terbesar berpengaruh signifikan negatif terhadap probabilitas terjadinya skandal dalam perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi saham terbesar, maka probabilitas terjadinya skandal dalam perusahaan akan menurun.

Parker *et al.* (2002) menemukan bahwa kepemilikan *blockholder* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemilik saham *blockholder* cenderung melindungi perusahaan. Uji univariat dari Chen *et al.* (2005) menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak terlibat *fraud* memiliki

prosentase saham terbesar yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang terlibat *fraud*. Ningsaptiti (2010) juga menemukan pengaruh signifikan negatif dari kepemilikan terbesar terhadap manajemen laba. Hasil ini berarti semakin besar kepemilikan saham, maka semakin kecil praktek manajemen laba.

Beberapa penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan saham terbesar berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Semakin besar prosentase saham yang dimiliki pemegang saham terbesar maka kendali atas perusahaan akan semakin besar. Pemegang saham terbesar memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap perusahaan, sehingga mereka cenderung untuk melindungi perusahaan dari terjadinya *fraud*. Jika terjadi *fraud* dalam perusahaan, maka reputasi perusahaan tersebut akan buruk di mata masyarakat dan dapat berakibat buruk pada keuangan perusahaan, dan tentu saja ini akan berimbas buruk bagi kelangsungan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

#### **2.15 Pengaruh Tipe Auditor terhadap *Fraud***

Lee *et al.* (2007) menemukan bahwa auditor *Big 4* memiliki kualitas pengauditan yang lebih tinggi dibanding auditor lainnya. Perols (2008) juga menemukan bahwa audit dari auditor *Big 4* berpengaruh secara signifikan positif terhadap pendeteksian terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Chen *et al.* (2005) dan Law (2010) menemukan bahwa tipe auditor tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*.

Antonia (2008) yang menemukan bahwa tipe auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hal ini sesuai dengan Zhou dan Elder (2001) yang menemukan perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh auditor *Big 5* cenderung tidak melakukan manajemen laba sebelum IPO dibandingkan perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh auditor non *Big 5*. Hasil tersebut mungkin disebabkan karena auditor yang berkualitas dapat mendeteksi terjadinya manajemen laba secara lebih dini (Widyaningdyah, 2001).

Beberapa penelitian tersebut mengindikasikan bahwa tipe auditor memiliki pengaruh yang negatif terhadap probabilitas terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Pengaruh yang negatif menunjukkan bahwa jika perusahaan diaudit oleh auditor yang memiliki kualitas baik seperti *Big 4*, kemungkinan terjadinya *fraud* akan berkurang. Tujuan audit ialah mengurangi ketidaksielarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Auditor akan mengaudit laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajerial, sehingga auditor dapat membantu mendeteksi terjadinya *fraud* perusahaan lebih dini. Auditor yang terpercaya dan berkualitas akan menghalangi terjadinya *fraud* dalam perusahaan.

## 2.16 Hipotesis

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari jumlah dewan komisaris, prosentase komisaris

independen, jumlah rapat komisaris, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan manajerial, lama masa jabatan komisaris, dan tipe auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

## 2.17 Model Analisis

Model analisis dari penelitian ini adalah regresi logistik dengan menggunakan persamaan penelitian sebagai berikut:

$$\text{FRAUD}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{SIZE}_{i,t} + \beta_2 \text{INDEP}_{i,t} + \beta_3 \text{MEET}_{i,t} + \beta_4 \text{CEOTEN}_{i,t} + \beta_5 \text{KEPMAN}_{i,t} + \beta_6 \text{TOP}_{i,t} + \beta_7 \text{AUDITOR}_{i,t} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- FRAUD<sub>i,t</sub> = variabel *dummy*, bernilai 1 jika terdapat *internal fraud* pada perusahaan i tahun t, dan sebaliknya bernilai 0.
- SIZE<sub>i,t</sub> = jumlah dewan komisaris di perusahaan i pada tahun t
- INDEP<sub>i,t</sub> = prosentase komisaris independen di perusahaan i pada tahun t
- MEET<sub>i,t</sub> = jumlah rapat komisaris dalam satu tahun di perusahaan i pada tahun t
- CEOTEN<sub>i,t</sub> = lama masa jabatan komisaris utama saat itu (dalam tahun) di perusahaan i pada tahun t
- KEPMAN<sub>i,t</sub> = prosentase total kepemilikan saham oleh manajemen (dewan komisaris dan direksi) pada perusahaan i tahun t
- TOP<sub>i,t</sub> = prosentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar di perusahaan i pada tahun t
- AUDITOR<sub>i,t</sub> = variabel *dummy* yang bernilai 1 jika perusahaan i tahun t diaudit oleh salah satu KAP yang berafiliasi dengan auditor

Big 4, yaitu *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Pricewaterhouse Cooper* (PWC), *Ernst & Young* dan KPMG dan sebaliknya bernilai 0.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan alat analisa regresi logistik dengan satu variabel tergantung dan tujuh variabel bebas. Analisa regresi logistik digunakan untuk alasan variabel dependen yang bersifat kategorikal (non metrik) serta enam variabel independen yang metrik dan satu variabel independen non metrik. Data yang digunakan ialah jenis data sekunder dan data primer untuk mengetagui index corporate governance yang diambil secara panel dari 2000-2012.

#### 3.2 Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang akan dianalisis pada penelitian ini ialah sebagai berikut,

##### 1. Variabel tergantung

Variabel tergantung dari penelitian ini adalah variabel *dummy*, yang bernilai 1 jika perusahaan *i* pada tahun *t* terjadi *internal fraud* berdasarkan SE BI Nomor 9/12/DPNP dan sebaliknya bernilai 0.

##### 2. Variabel bebas

Variabel bebas dari penelitian ini adalah :

1. Jumlah dewan komisaris
2. Komisaris independen
3. Jumlah rapat komisaris
4. Lama masa jabatan direktur utama
5. Kepemilikan manajerial

6. Kepemilikan saham terbesar

7. Tipe auditor

#### 3.3 Definisi Operasional

Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara melakukan definisi operasional terhadap variabel-variabel yang dibutuhkan. Variabel yang digunakan adalah,

##### 1. *Fraud*

Chen *et al.* (2005) memprosi *fraud* yang merupakan variabel *dummy*, bernilai 1 jika perusahaan merupakan subjek dari tindakan hukum yang diberikan oleh CSRC dan sebaliknya bernilai 0. Zhang (2005) memproksi *fraud* yang merupakan variabel *dummy* bernilai 1 jika perusahaan mengalami insiden skandal keuangan yang dilaporkan secara publik dan mendapat tindakan hukum dari CSRC, dan sebaliknya bernilai 0. Pada penelitian ini, *fraud* yang merupakan variabel *dummy*, yang bernilai 1 jika perusahaan *i* pada tahun *t* terjadi *internal fraud* berdasarkan SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 dan sebaliknya bernilai 0.

##### 2. Jumlah dewan komisaris

Berdasarkan penelitian Nasution dan Setiawan (2007) serta Ujiyantho dan Pramuka (2007) jumlah dewan komisaris perusahaan *i* tahun ke *t* diukur dari keseluruhan jumlah dewan komisaris perusahaan *i* tahun *t*.

##### 3. Komisaris independen

Komisaris independen di perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan penelitian Nasution dan Setiawan (2007) dan Palestin (2008) diukur sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen}_{i,t} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}_{i,t}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}_{i,t}} \times 100$$

4. Jumlah rapat komisaris  
Berdasarkan penelitian Juwitasari (2008) dan Waryanto (2010) jumlah rapat komisaris di perusahaan *i* pada tahun *t* diukur dengan jumlah rapat komisaris yang diselenggarakan dalam satu tahun.

5. Lama masa jabatan direktur utama  
Berdasarkan penelitian Beasley (1996), dan Chen *et al.*, (2005) lama masa

jabatan seorang direktur utama di perusahaan *i* pada tahun *t* diukur dari jumlah tahun seorang direktur utama saat itu menjabat.

6. Kepemilikan manajerial  
Berdasarkan penelitian Ujijantho dan Pramuka (2007) dan Antonia (2008), kepemilikan manajerial dihitung sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial}_{i,t} = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki direksi dan komisaris}_{i,t}}{\text{Jumlah Seluruh Saham}_{i,t}} \times 100$$

7. Kepemilikan saham terbesar  
Berdasarkan penelitian Chen *et al.*, (2005) dan Zhang (2005), proporsi

saham dari pemegang saham terbesar dihitung sebagai berikut:

$$\text{Kep. Saham Terbesar}_{i,t} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Pemilik Saham Terbesar}_{i,t}}{\text{Jumlah Seluruh Saham}_{i,t}} \times 100$$

8. Tipe auditor  
Berdasarkan penelitian Zhou dan Elder (2004), Antonia (2008), dan Perols (2008) tipe auditor diproksi sebagai variabel *dummy* yang bernilai 1 jika perusahaan *i* tahun *t* diaudit oleh salah satu auditor *Big 4* atau KAP yang berafiliasi dengan auditor *Big 4*, yaitu Deloitte Touche Tohmatsu, Pricewaterhouse Cooper (PWC), Ernst & Young dan KPMG dan sebaliknya bernilai 0.

penentuan sampel dengan menentukan batasan atau pertimbangan tertentu. Penelitian ini menentukan sampel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sampel tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000-2012.
2. Sampel memiliki kelengkapan data mengenai *internal fraud*, jumlah dewan komisaris, prosentase komisaris independen, jumlah rapat komisaris dalam setahun, lama masa jabatan direktur utama, prosentase saham yang dimiliki direksi dan komisaris, prosentase saham terbesar, dan tipe auditor dari perusahaan tersebut.
3. Data primer yang didapatkan dari survey menggunakan kuesioner.

### 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu metode

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 sampai 2010. Pada 2007 terdapat 27 perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, tapi hanya 13 perusahaan yang layak dijadikan sampel. Pada tahun 2008 terdapat 28 perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Namun hanya 19 perusahaan yang sesuai dijadikan sampel. Pada tahun 2009 terdapat 29 perusahaan perbankan yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan hanya 21 perusahaan yang layak dijadikan sampel penelitian. Terdapat 31 perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan yang sesuai

dijadikan sampel penelitian sejumlah 24 perusahaan. Semua perusahaan yang tidak layak dijadikan sampel penelitian karena data yang disajikan tidak lengkap sesuai kriteria penelitian ini dan atau mengandung informasi yang tidak konsisten. Total pengamatan sebesar 77 pengamatan.

### 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini meneliti sebesar 86 pengamatan. Dari seluruh pengamatan tersebut, 29 pengamatan diantaranya tergolong pada perusahaan yang tidak mengalami *internal fraud*, sisanya sebesar 57 pengamatan tergolong pada perusahaan yang mengalami *internal fraud*. Sebesar 23 pengamatan yang tidak diaudit oleh auditor *Big 4*, sisanya sebesar 63 perusahaan diaudit oleh auditor *Big 4*. Berikut tabel statistik deskriptif dari penelitian ini.

Tabel 4.1  
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Rata-rata	Standart Deviasi
FRAUD	77	0,00	1,00	0,6623	0,47601
SIZE	77	2,00	9,00	5,3506	1,81199
INDEP	77	50,00	75,00	56,1805	7,18267
MEET	77	3,00	51,00	16,0909	13,03253
CEOTEN	77	0,08	14,00	3,5839	3,20946
KEPMAN	77	0,0000	1,6100	0,254683	0,4460203
TOP	77	15,419	99,996	57,2717	18,585025
AUDIT	77	0,00	1,00	0,7662	0,42600

Tabel 4.1 menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari semua variabel independen dan varaiabel dependen. Nilai

minimum menunjukkan nilai terkecil pada setiap variabel yang diteliti. Nilai maksimum menunjukkan nilai terbesar dari variabel yang diteliti. Rata-rata

menunjukkan nilai rata-rata dari setiap variabel yang diamati. Standar deviasi menunjukkan fluktuasi dari setiap variabel yang diamati.

Nilai minimum variabel *FRAUD* sebesar 0 dan nilai maksimumnya sebesar 1. Hal ini dikarenakan variabel tersebut merupakan variabel *dummy* yang bernilai 0 atau 1. *Mean* variabel tersebut sebesar 0,6623. Ini menunjukkan bahwa sampel yang mengalami *fraud* lebih besar dibandingkan yang tidak terjadi. Standar deviasi sebesar 0,47601 yang menunjukkan besar penyimpangannya.

Variabel *SIZE* memiliki nilai minimum sebesar 2, yang berarti jumlah dewan komisaris terkecil selama pengamatan ialah 2 orang. Jumlah dewan komisaris tertingginya sebesar 9 orang yang terlihat dari nilai maksimumnya. Rata-rata dari variabel ini sebesar 5,3506 yang berarti rata-rata jumlah dewan komisaris selama pengamatan antara 5 sampai 6 orang. Penyimpangan variabel ini sebesar 1,81199.

Variabel *INDEP* yang menunjukkan prosentase komisaris independen, memiliki nilai minimum sebesar 50%. Nilai maksimumnya bernilai 100% yang berarti seluruh dewan komisaris ialah komisaris independen. rata-rata variabel ini bernilai 56,1805% yang menunjukkan rata-rata perusahaan yang diamati telah mengikuti aturan Bank Indonesia yang tertuang pada SE BI No. 9/12/DPNP. Aturan tersebut mengharuskan setiap bank memiliki minimal 50% komisaris independen dari keseluruhan dewan komisaris. Penyimpangannya sebesar 7,18267.

Nilai minimum dari variabel *MEET* sebesar 3, yang berarti jumlah rapat dewan komisaris dalam setahun paling sedikit diantara semua pengamatan ialah 3 kali. Nilai maksimumnya sebesar 51, yang menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris yang paling besar ialah 51 kali setahun. Rata-rata variabel ini sebesar 16,0909 atau bisa disimpulkan rata-rata rapat dewan komisaris dalam setahun pada sampel pengamatan berkisar antara 16 sampai 17 kali. Standar deviasi variabel tersebut sebesar 13,03253.

Variabel *CEOTEN* menunjukkan lama masa jabatan direktur utama dalam tahun. Nilai minimum variabel ini bernilai 0,08 dan nilai maksimum bernilai 14, yang berarti selama pengamatan lama masa jabatan direktur utama paling singkat adalah 0,08 tahun dan paling lama sebesar 14 tahun. Rata-rata direktur utama menjabat selama 3,5839 tahun. Besar nilai penyimpangan variabel ini ialah 3,20946.

Kepemilikan manajerial (*KEPMAN*) memiliki nilai paling kecil 0,000021 (0,000 pada tabel) yang berarti kepemilikan manajerial pada perusahaan pada sampel penelitian ialah 0,000021%. Variabel ini memiliki nilai paling besar 1,61 yang berarti kepemilikan manajerial perusahaan paling tinggi pada sampel penelitian ialah 1,61%. Rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 0,254683%. Standar deviasi variabel ini ialah 0,4460203. Standar deviasi variabel ini paling rendah di antara standar deviasi variabel metrik lainnya. Hal ini menunjukkan fluktuasi data variabel ini paling rendah di antara variabel metrik lainnya.

Nilai minimum variabel *TOP* (prosentase pemegang saham terbesar) sebesar 15,419% dan nilai maksimumnya ialah 99,996%. Rata-rata prosentase kepemilikan saham terbesar sebesar 57,2717%. Besar nilai penyimpangannya ialah 18,585025. Standar deviasi variabel ini paling tinggi di antara variabel metrik lainnya. Hal ini berarti variabel ini memiliki fluktuasi data yang paling tinggi di antara variabel metrik lainnya.

Variabel *AUDIT* berkisar antara 0 sampai 1 dikarenakan variabel ini merupakan variabel *dummy* yang bernilai 0 jika perusahaan tidak diaudit oleh auditor *Big 4* dan bernilai 1 jika perusahaan diaudit

oleh auditor *Big 4*. *Mean* sebesar 0,7662 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel pengamatan diaudit oleh auditor *Big 4*. Standar deviasi variabel ini sebesar 0,42600.

### 4.3 Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk mendapatkan model regresi dan pengujian hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi logistik untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.4  
Hasil Regresi Logistik *Fraud*

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
SIZE	0,586	0,236	6,176	1	0,013	1,797
INDEP	-0,013	0,052	0,064	1	0,800	0,987
MEET	0,044	0,034	1,635	1	0,201	1,045
CEOTEN	0,029	0,113	0,065	1	0,799	1,029
KEPMAN	-1,804	0,885	4,158	1	0,041	0,165
TOP	0,023	0,021	1,246	1	0,264	1,023
AUDIT(1)	-0,901	0,815	1,221	1	0,269	0,406
Constant	-2,833	3,354	0,713	1	0,398	0,059

Berbeda dengan regresi linier berganda, koefisien regresi logistik tidak bisa diinterpretasikan secara langsung. Menurut Chaniago (2009), koefisien regresi logistik menunjukkan perubahan dalam logit sebagai akibat perubahan satu satuan variabel independen. Dalam model logit dikembangkan pengukuran yang dikenal dengan *odds ratio*. Pada output

SPSS kolom *Exp(B)* menunjukkan *odds ratio* masing-masing variabel.

Berdasarkan model kolom *Exp(B)*, maka berikut interpretasi dari *odds ratio* tersebut:

1. Perusahaan dengan jumlah dewan komisaris yang lebih besar satu orang memiliki probabilitas *fraud* 1,797 kali dibandingkan jumlah dewan komisaris

- yang lebih kecil (satu orang) atau perusahaan dengan jumlah dewan komisaris yang lebih besar memiliki probabilitas *fraud* yang lebih tinggi.
2. Perusahaan dengan prosentase komisaris independen yang lebih besar 1% memiliki peluang *fraud* 0,987 kali dibandingkan jumlah dewan komisaris yang lebih kecil (1%) atau perusahaan dengan prosentase komisaris independen yang lebih besar memiliki probabilitas *fraud* yang lebih rendah.
  3. Perusahaan dengan jumlah rapat komisaris yang lebih banyak satu kali dalam setahun memiliki peluang *fraud* 1,045 kali dibandingkan jumlah rapat komisaris yang lebih kecil (satu kali dalam setahun) atau perusahaan dengan jumlah rapat komisaris yang lebih besar memiliki probabilitas *fraud* yang lebih tinggi.
  4. Perusahaan dengan lama jabatan direktur utama lebih lama satu tahun memiliki peluang *fraud* 1,029 kali dibandingkan lama jabatan direktur utama yang lebih singkat (satu tahun) atau perusahaan dengan lama jabatan direktur utama yang lebih lama memiliki probabilitas *fraud* yang lebih tinggi.
  5. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial lebih besar 1% memiliki peluang *fraud* 0,165 kali dibandingkan kepemilikan manajerial yang lebih kecil (1%) atau perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih besar memiliki probabilitas *fraud* yang lebih rendah.
  6. Perusahaan dengan kepemilikan saham terbesar lebih besar 1% memiliki peluang *fraud* 1,023 kali dibandingkan kepemilikan manajerial yang lebih kecil (1%) atau perusahaan dengan kepemilikan saham terbesar yang lebih besar memiliki probabilitas *fraud* yang lebih tinggi.
  7. Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan auditor *Big 4* memiliki peluang *fraud* 0,406 kali dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi dengan auditor *Big 4* atau perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan auditor *Big 4* memiliki probabilitas *fraud* yang lebih rendah.

Tabel 4.5  
Classification Table

	<i>Observed</i>		<i>Predicted</i>		
			FRAUD		<i>Percentage Correct</i>
			NO FRAUD	FRAUD	
Step 1	FRAUD	NO FRAUD	19	7	73.1
		FRAUD	3	48	94.1
	<i>Overall Percentage</i>				87.0

*Overall percentage* pada *classification table* tersebut menunjukkan model regresi yang terbentuk mampu membuat klasifikasi dalam penaksiran nilai *Y (fraud)* sebesar 87%.

Analisis regresi logistik tersebut menghasilkan suatu pembuktian untuk hipotesis. Jumlah dewan komisaris diindikasikan memiliki pengaruh positif terhadap *fraud*. Hal ini dapat dikarenakan sulitnya koordinasi dalam tugas pengawasan (Nasution dan Setiawan, 2007). Variabel *SIZE* memiliki signifikansi 0,013 yang kurang dari 0,05 (signifikan) dan koefisiennya bernilai 0,586. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif jumlah dewan komisaris terhadap *fraud* ( $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima).

Prosentase komisaris independen diindikasikan memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud*. Beasley (1996) menemukan bahwa *outside director* meningkatkan keefektifan pengawasan. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki signifikansi 0,8 yang lebih dari 0,05 (tidak signifikan) dan koefisien yang bernilai -0,013. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif komisaris independen terhadap *fraud* ( $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak)

Jumlah rapat dewan komisaris dihipotesiskan memiliki pengaruh positif terhadap *fraud*. Jumlah rapat yang lebih sering mungkin suatu sinyal adanya pengawasan yang lebih ketat (Chen *et al.*, 2005). *MEET* memiliki signifikansi 0,201 yang lebih dari 0,05 (tidak signifikan) dengan koefisien sebesar 0,044. Hasil tersebut berarti tidak terdapat pengaruh

positif rapat komisaris terhadap *fraud* ( $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak).

Variabel *CEOTEN* diindikasikan memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud*. Singkatnya masa jabatan direktur utama dimungkinkan mengakibatkan seorang direktur utama memiliki pengetahuan tentang perusahaan tersebut yang terbatas (Chen *et al.*, 2005). Akan tetapi, hasil regresi logistik menunjukkan bahwa lama masa jabatan direktur utama memiliki tingkat signifikansi 0,799 yang lebih dari 0,05 (tidak signifikan) dengan koefisien sebesar 0,029. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif lama masa jabatan direktur utama terhadap *fraud* ( $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak).

Kepemilikan manajerial dihipotesiskan memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud*. Adanya peningkatan kepemilikan manajerial dapat mendorong manajer untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer untuk bertindak secara hati-hati (Jensen & Meckling, 1976). Variabel *KEPMAN* memiliki signifikansi 0,041 yang kurang dari 0,05 (signifikan) dan koefisien variabel yang bernilai -1,804. Hasil tersebut berarti terdapat pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap *fraud* ( $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima).

Kepemilikan saham terbesar diindikasikan memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud*. Adanya kepentingan yang semakin besar terhadap perusahaan seiring dengan bertambahnya kepemilikan saham, membuat pemilik saham terbesar cenderung melindungi perusahaan dari *fraud* (Chen *et al.*, 2005). Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa kepemilikan saham terbesar memiliki signifikansi

sebesar 0,264 yang lebih dari 0,05 (tidak signifikan) dengan koefisien sebesar 0,023. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh negatif kepemilikan saham terbesar terhadap *fraud* ( $H_0$  diterima dan  $H_6$  ditolak).

Tipe auditor dihipotesiskan memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud*. Lee *et al.* (2007) menemukan bahwa auditor *Big 4* memiliki kualitas pengauditan yang lebih tinggi dibanding auditor lainnya, sehingga dapat mengurangi probabilitas terjadinya *fraud*. Secara statistik, tipe auditor memiliki signifikansi 0,269 yang lebih dari 0,05 (tidak signifikan) dan koefisien sebesar -0,901. Hasil tersebut berarti tipe auditor tidak memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud* ( $H_0$  diterima dan  $H_7$  ditolak).

#### 4.4 Pembahasan

Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa dua hipotesis penelitian diterima. Lima hipotesis penelitian lainnya ditolak karena hasil regresi logistik tidak ada pengaruh signifikan terhadap *fraud* dan berlawanan arah dengan teori. Berikut pembahasan hasil uji regresi logistik pengaruh jumlah dewan komisaris, prosentase komisaris independen, jumlah rapat komisaris, lama masa jabatan direktur utama, kepemilikan manajerial, kepemilikan saham terbesar, dan tipe auditor terhadap *fraud*.

Jumlah dewan komisaris secara statistik berpengaruh signifikan positif terhadap *fraud*, yang berarti semakin besar jumlah dewan komisaris maka probabilitas terjadinya *fraud* akan semakin tinggi. Hasil ini sesuai dengan penelitian Beasley (1996) yang menyebutkan bahwa jumlah *board*

berpengaruh signifikan positif terhadap *fraud* dan Yermack (1996) membuktikan bahwa *board* yang kecil lebih efektif dibanding dewan komisaris yang besar. Nasution dan Setiawan (2007) juga menemukan adanya pengaruh signifikan positif dari jumlah dewan komisaris terhadap manajemen laba. Jumlah dewan komisaris yang lebih banyak akan membuat kinerja dewan komisaris tidak efektif (Jensen, 1993). Hal ini mungkin dikarenakan semakin besar jumlah dewan komisaris maka koordinasinya pun akan semakin rumit dan sulit dilakukan, sehingga hal ini dapat memberikan celah pada manajemen maupun pegawai untuk melakukan *fraud*. Semakin banyaknya dewan komisaris juga mungkin dapat mengakibatkan proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pengawasan yang lebih lama, karena membutuhkan lebih banyak koordinasi. Vafeas (1999) juga menunjukkan jika jumlah dewan komisaris yang lebih besar berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Dampak negatif pada kinerja juga menunjukkan bahwa dewan komisaris yang semakin besar memiliki efektivitas yang kurang.

Komisaris independen secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Hasil ini bertentangan dengan Beasley (1996), Uzun *et al.* (2004), dan Chen *et al.* (2005) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*. Hal ini mungkin disebabkan adanya penambahan komisaris independen dimaksudkan untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan setiap bank memiliki komisaris independen paling sedikit 50% dari total dewan komisaris. Gideon (2005) menjelaskan penambahan komisaris

independen dimungkinkan hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi, sedangkan pemegang saham terbesar dan pendiri perusahaan masih berperan penting, sehingga kinerja komisaris independen cenderung menurun. Siregar dan Utama (2006) juga berpendapat bahwa adanya kemungkinan pengangkatan komisaris independen hanya untuk keperluan regulasi, bukan untuk menegakkan *good corporate governance* pada perusahaan. Komisaris independen yang baru diangkat untuk memenuhi ketentuan BI juga mungkin belum efektif dalam melakukan tugasnya, sehingga penambahan komisaris independen tidak berpengaruh pada probabilitas *fraud*.

Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya *fraud*. Hasil tersebut tidak mendukung penelitian Conger *et al.* (1998), Vafeas (1999), dan Chen *et al.* (2005). Akan tetapi, hasil ini mendukung penelitian Johnson *et al.* (2005) yang tidak menemukan pengaruh dari jumlah rapat *board* terhadap *fraud*. Hasil ini mungkin karena adanya keterlibatan manajemen pada rapat dewan komisaris. Bhagat (2003) dalam Juwitasari (2008) menjelaskan bahwa keterlibatan manajer senior dalam rapat dewan komisaris dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dewan komisaris. Hal ini dapat membuat pengawasan oleh komisaris menjadi kurang atau tidak efektif. Juwitasari (2008) juga menemukan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yang dimungkinkan karena rapat dewan komisaris berisi tentang hal-hal yang mendetail seperti tugas dan tanggung jawab bawahannya, bukan tugas utamanya.

Kemungkinan keikutsertaan pemilik saham terbesar dalam rapat dewan komisaris juga dapat menurunkan efektivitas pengawasan komisaris.

Lama masa jabatan direktur utama, secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Hasil ini tidak mendukung penelitian Parker *et al.* (2002) dan Chen *et al.* (2005). Namun hasil ini sesuai dengan penelitian Beasley (1996), Uzun *et al.* (2004), Johnson *et al.* (2005), dan Cornett *et al.* (2006) yang menemukan bahwa lama masa jabatan direktur utama tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa direktur utama tidak mengurangi keefektifan dalam pengawasan *fraud*. Lama masa jabatan direktur utama tidak dapat mempengaruhi *fraud*. Hal ini mungkin dikarenakan penggantian direktur utama bukan dikarenakan banyaknya kasus *fraud* di perusahaan, namun salah satunya cenderung pada kinerja perusahaan terhadap industri (Kaplan & Minton, 2006). Para pemegang saham cenderung memperhatikan kinerja perusahaan terhadap industri selama dipimpin oleh direktur utama tersebut. Jika kinerja perusahaan lebih buruk dibandingkan rata-rata industri dalam beberapa periode, maka pemegang saham akan mempertimbangkan untuk mengganti direktur utama tersebut. Kecenderungan pemegang saham untuk melihat kinerja perusahaan terhadap industri juga mungkin mengakibatkan direktur utama lebih memperhatikan kinerja perusahaan terhadap industri dibandingkan *fraud*.

Hasil statistik regresi logistik juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif

terhadap *fraud*. Kepemilikan manajerial yang meningkat, mampu menurunkan probabilitas terjadinya *fraud*. Hasil tersebut mendukung penelitian Vafeas (1999), Warfield *et al.* (1995), Saleh *et al.* (2005), Ujiyantho dan Pramuka (2007), dan Antonia (2008). Hasil tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan kepemilikan manajerial dapat mendorong manajer untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer untuk bertindak secara hati-hati (Jensen & Meckling, 1976). Jika manajer bertindak hati-hati maka dimungkinkan terjadi penurunan probabilitas *fraud*. Manajer juga mungkin terdorong untuk menciptakan citra perusahaan yang baik untuk saham yang dimiliki. Jika terjadi *fraud*, citra perusahaan akan turun di mata masyarakat dan dapat menurunkan nilai perusahaan. Akibat tersebut juga akan merugikan manajer sebagai pemegang saham, sehingga akan terdorong menghalangi terjadinya *fraud*.

Variabel kepemilikan saham terbesar secara statistik tidak memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud*. Hasil tersebut bertentangan dengan Zhang (2005) yang menemukan adanya pengaruh negatif dari kepemilikan saham terbesar terhadap skandal keuangan. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian Parker *et al.* (2002) dan Ningsaptiti (2010). Akan tetapi hasil tersebut mendukung penelitian Chen *et al.* (2005) yang tidak menemukan adanya pengaruh dari kepemilikan terbesar terhadap *fraud*. Tidak adanya pengaruh berarti pengawasan dari kepemilikan saham terbesar tidak berjalan efektif. Ini mungkin dikarenakan pengawasan dilakukan oleh satu pihak. Jika

kepemilikan saham adalah kepemilikan saham tersebar, mungkin pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya pihak yang mengawasi, sehingga akan lebih objektif dan efektif.

Tipe auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Chen *et al.* (2005) dan Law (2010) yang tidak menemukan pengaruh signifikan dari tipe auditor terhadap *fraud*. Hasil ini mungkin diakibatkan karena lingkungan dimana auditor beroperasi sangat kompetitif, sehingga auditor non *Big 4* (KAP yang tidak berafiliasi dengan auditor *Big 4*) juga terpacu untuk meningkatkan kualitas auditnya untuk bisa menyaingi auditor yang berafiliasi dengan *Big 4* (Law, 2010). Di Indonesia pasar auditor cukup kompetitif. Ini dibuktikan dengan banyaknya KAP di Indonesia, sehingga untuk mendapatkan kepercayaan klien dan reputasi yang baik KAP bersaing untuk memberikan layanan yang terbaik. Akan tetapi, hasil tersebut tidak mendukung penelitian Zhou dan Elder (2001), Lee *et al.* (2007), Widyaningdyah (2001), Antonia (2008), dan Perols (2008).

## 5. Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari jumlah dewan komisaris, prosentase komisaris independen, jumlah rapat komisaris, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan manajerial, lama masa jabatan komisaris, dan tipe auditor terhadap kecurangan laporan keuangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa:

1. Variabel jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Variabel komisaris independen, jumlah rapat komisaris, lama masa jabatan direktur utama, kepemilikan saham terbesar, dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2006). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governace bagi Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2007). *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beasley, M.S. (1996). An Empirical Analysis of the Relation between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, 71, 443-465.
- Chandra, Aditiawan. (2011). *Membangun Tatakelola Perusahaan*, (Online). Retrieved 19 Oktober 2011, from <http://www.iicg.org>.
- Chaniago, Junaidi. (2009). *Regresi Logit (Seri 6 Model Ekonometrik dengan SPSS)*, (Online). Retrieved 6 Maret 2012, from <http://junaidichaniago.blogspot.com>.
- Chen, Gongmeng, *et al.* (2006). Ownership Structure, Corporate Governance, and Fraud: Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 12, 424-448.
- Chtourou, *et al.* (2001). *Corporate Governance and Earning Management*. Working paper tidak dipublikasikan. Université Laval.
- Cornett M. M., *et al.* (2006). *Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance*. Working paper tidak dipublikasikan. New York University.
- Ditama Binbangkum. (2008). *Fraud (Kecurangan): Apa dan Mengapa?*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- Fama. E.F. dan M.C. Jensen. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal Of Law and Economics*, 26, 301-325.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. (2011). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

- Jensen, M.C., (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*, 48, 831-880.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Johnson, S.A., et al. (2005). Executive Compensation and Corporate Fraud. *Working paper tidak diterbitkan. Universitas A&m Texas*.
- Kaplan, Steven N. dan Bernadette A. Minton. (2006). How has CEO Turnover Change? Increasingly Performance Sensitive Board an Increasingly Uneasy CEOs. *Working paper tidak diterbitkan. Ohio State University*.
- Launa. (2011, April 5). Kecurangan Internal Perbankan Indonesia, (Online). Retrieved 15 Oktober 2011 from <http://www.banjarmasinpost.co.id>.
- Law, Philip. (2010). Corporate Governance and No Fraud Occurrence in Organizations. *Managerial Auditing Journal*, 26 (6), 501-518.
- Lee, B., et al. (2007). Have The Big Accounting Firms Lost Their Audit Quality Advantage? Evidence from The Returns-Earning Relation. *Journal of Forensic Accounting*, 8(1), 84-271.
- Meutia, Inten. (2004). Pengaruh Independensi Auditor terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big 5 dan Non Big 5. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 7(10), 333-350.
- Parker, Susan. (2002). Corporate Governance and Corporate Failure: A Survival Analysis. *Corporate Governance Journal*, 2, 1-12.
- Perols, J. (2008). *Detecting Financial Statement Fraud: Three essays on Fraud Predictors, Multi-classifier Combination and Fraud Detection Using Data Mining*. Tampa: Universitas Florida Selatan.
- Rosenstein, S. dan J.G. Wyatt. (1990). Outside Directors, Board Independence, and Shareholder Wealth. *Journal of Financial Economics*, 26, 175-191.
- Saleh, Norman Mohd., et al. (2005). Earning Management and Board Characteristic: Evidence from Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 24, 77-103.
- Siregar, Sylvia Veronica N. P. & Siddharta Utama. (2006). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek *Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Laba (*Earning Management*). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 9(10), 307-326.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2002). *Ekonometrika Pengantar*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Surveyor Indonesia. (2007). *Board Manual (Panduan bagi Komisaris dan Direksi)*. Jakarta: Surveyor Indonesia.
- Uzun, H., et al. (2004). Board Composition and Corporate Fraud. *Financial Analysis Journal*, 60, 33-43.
- Vafeas, N., (1999). Board Meeting Frequency and Firm Performance. *Journal of Financial Economics*, 53, 113-142.
- Warfield, et al. (1995). Managerial Ownership, Accounting Choices, and Informativeness of Earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 20, 61-91.
- Widyaningdyah A.U. (2001). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Earning Management* Pada Perusahaan *Go Public* Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 3, 89-101.
- Yermack, D. (1996). Higher Market Valuation of Companies with a Small Board of Directors. *Journal of Financial Economics*, 40, 185-211.
- Zhang, Yi & Guang Ma. (2005). Law, Economic, Corporate Governance, and Corporate Scandal in a Transition Economy: Insight from China. *Working paper tidak diterbitkan. Guanghua School of Management*.
- Zhou, Jian dan Randal J. Elder. (2001). Audit Firm Size, Industry Specialization and Earnings Management by Initial Public Offering Firms. *Working paper tidak diterbitkan. University of Hawaii at Manoa*.

